



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
TAHUN 2016



KATA PENGANTAR



Segala Pujihanyamilik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalutercurahkan kepada Rasulullah SAW karenaberkat limpahan rahmat dan berkahNya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, serta Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah disempurnakan/direvisi berdasarkan evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2015. Hal ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari kerjasamadankerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, dan kami akan berupaya untuk perbaikan dan penyempurnaannya di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengendalian dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat untuk masa yang akan datang.

Batusangkar, Maret 2017
BUPATI TANAH DATAR

ttd

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021.

Berdasarkan evaluasi atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan untuk dapat melaksanakan Reviu terhadap RPJMD dan Indikator Kinerja Utama yang ada pada Perjanjian Kinerja dari yang selama ini lebih berorientasi *Output* kepada Indikator Kinerja yang berorientasi *Outcome*, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibawah bimbingan dan pendampingan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berupaya menyempurnakan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2016, sehingga Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi 11 sasaran dan 22 indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

1. Misi pertama terdiri dari 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja;
2. Misi kedua terdiri dari 1 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja;
3. Misi ketiga terdiri 2 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja;
4. Misi keempat terdiri `1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja;
5. Misi kelima terdiri 2 tujuan 2 sasaran dan 3 indikator kinerja.

Capaian sasaran pada ***misi pertama***, terdiri atas 3 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 3 indikator kinerja atau 100% dan telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, pada semua indikator kinerja.

Capaian ***misi kedua***, berjumlah 7 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 4 indikator kinerja atau 57,15 % dan sebanyak 4 indikator kinerja atau 42,85% yang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Capaian pada ***misi ketiga*** berjumlah 6 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 3 indikator kinerja atau 50 % dan sebanyak 3 indikator kinerja atau 50% yang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Capaian ***misi keempat*** berjumlah 3 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 1 indikator atau 33,33% dan sebanyak 2 indikator atau 66,67% yang belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian ***misi kelima*** berjumlah 3 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 2 indikator atau 66,67 % dan sebanyak 1 indikator atau 33,33% yang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran dengan jumlah keseluruhan 22 indikator kinerja terdapat 13 indikator atau 59,09 % yang telah dan/atau melampaui target dan 9 indikator atau 40,91% belum mencapai target. Dari 9 dari indikator yang belum memenuhi target, ada 1 indikator yang belum bisa diukur karena baru akan dilaksanakan pada tahun 2017. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kedepannya akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR REVIU	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Latar Belakang	2
1.3 Urusan Pemerintahan	3
1.4 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar	9
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Datar 2010-2015	21
2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi	21
2.1.2 Agenda dan Prioritas Pembangunan	23
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	24
2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016	26
2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja	38
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	39
3.3 Hasil Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	42
3.4 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	86
3.5 Realisasi Anggaran	87
BAB IV PENUTUP	88
Lampiran-lampiran	
- Perubahan Kedua IKU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021	
- Piagam Penghargaan atas Prestasi Kabupaten Tanah Datar	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten yang terletak pada pada posisi strategis, berada ditengah-tengah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuh pintu masuk menuju Kabupaten Tanah Datar dengan ibukota Batusangkar.

Dan luas wilayah Kabupaten Tanah Datar lebih kurang 1.336 km² atau 133.600 Ha, yang tersebar dalam 14 kecamatan, dengan 75 Nagari dan 395 Jorong.

Kabupaten Tanah Datar terletak diantara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Secara topografi Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh Daerah Perbukitan yang memiliki banyak aliran sungai yang berasal dari pegunungan. Disamping itu Kabupaten Tanah Datar memiliki 2/3 dari Danau Singkarak yang juga merupakan potensi ekonomi yang cukup baik.

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar keadaan 31 Desember 2016 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebanyak 365.040 jiwa, terdiri dari 182.954 jiwa berjenis kelamin Laki-Laki dan 182.086 jiwa berjenis kelamin Perempuan. Distribusi Penduduk yang terbesar terdapat pada Kecamatan X Koto dengan jumlah 42.404 jiwa dan terkecil Kecamatan Batipuh Selatan dengan jumlah 11.354 jiwa.

Potensi penduduk tersebut diharapkan mampu memiliki daya dukung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan, yang ditujukan untuk upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Datar. Program dan kegiatan prioritas pada setiap bidang atau sektor pembangunan, diharapkan akan mampu mencerminkan adanya kesatuan pembangunan antara aspek pemerintahan dan agama, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek tata ruang dan infrastruktur Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

1.2. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar serta sumber dana lainnya dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

Good Governance adalah pemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam rencana aksinya (*action plan*), hal ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yaitu terciptanya pemerintah yang bersih (*clean government*) yang meliputi aspek-aspek :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Disiplin dalam penerimaan dan penggunaan uang rakyat, agar tidak lagi mengutamakan pola *deficit funding* dan menghapuskan adanya dana *public non budgeter*.
3. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa setiap organisasi publik harus terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) dan Laporan Pertanggung-jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama ini telah berupaya untuk

memenuhi kewajibannya untuk mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada publik melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran dan informasi capaian dari arah dan kebijakan strategis pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 secara akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini adalah (1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat tugas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dapat diperoleh langsung dari penyusunan Laporan Kinerja antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadikan masuk dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

1.3. URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah otonom dituntut untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri, nyata

dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12, dinyatakan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Adapun **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar** meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertahanan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan, dan
18. Kearsipan

Disamping itu **urusan pilihan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Pertanian.
2. Kehutanan.
3. Pariwisata.
4. Perikanan dan Kelautan.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Perdagangan.
7. Industri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati Tanah Datar dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah tersebut terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat Daerah. Unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah dan unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- A. Perangkat Daerah
 1. Sekretariat Daerah tipe A
 2. Sekretariat DPRD tipe B
 3. Inspektorat Daerah tipe A
 4. Dinas Daerah, terdiri 10 Dinas tipe A, 5 Dinas tipe B dan 1 Dinas tipe C dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistic dan persandian
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan dan bidang energy dan sumberdaya mineral
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan

- m. Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan
 - n. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga
 - o. Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
 - p. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
5. Badan Daerah, terdiri dari 2 Badan tipe A dan 1 Badan tipe B dengan rincian sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan, Penelitian Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan
 - b. Badan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
6. Kecamatan, terdiri dari 14 Kecamatan dengan tipe A terdiri dari:
- a. Kecamatan X Koto
 - b. Kecamatan Batipuh
 - c. Kecamatan Rambatan
 - d. Kecamatan Lima Kaum
 - e. Kecamatan Tanjung Emas
 - f. Kecamatan Lintau Buo
 - g. Kecamatan Sungayang
 - h. Kecamatan Sungai Tarab
 - i. Kecamatan Pariangan
 - j. Kecamatan Salimpaung
 - k. Kecamatan Tanjung Baru

- l. Kecamatan Lintau Buo Utara
- m. Kecamatan Batipuh Selatan

B. Staf Ahli

Staf Ahli terdiri dari 3 (tiga) orang, bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Untuk menggerakkan struktur organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 7.356 orang pegawai negeri sipil, dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Kelompok Jabatan	Data Kelembagaan	Jml Pegawai 1 Des 16	Bup 2016	Hasil Anjab/ ABK
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi (Org) a. JPT Madya (Ess I) b. JPT Pratama (Ess II)	23	21	3	23
2.	Jabatan Administrasi (Org) a. Jab. Administrator (Ess III). b. Jab. Pengawas (Ess IV) c. Jab. Pelaksana (Ess V) d. Jab Pelaksana (JFU)	125 536 64	116 441 35 1.412	7 23 1 48	125 536 64 2.939
3.	Jab. Fungsional (Non guru dan Kesehatan) (Org)		303	11	515
4.	Guru (Org)		3.264	81	4.446
5.	Kesehatan (Org)		564	51	1.070
	Jumlah (Org)	748	6156	225	9.718

Sumber : BKD dan Diklat Kabupaten Tanah Datar

Pegawai Negeri Sipil sebagai penggerak roda Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas.

1.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

1.4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan fakta dan potensi yang ada, dirumuskan permasalahan yang nantinya akan dianalisa dan ditetapkan menjadi isu-isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dikelompokkan menjadi 6 (enam) aspek pembangunan yang mencakup:

1. Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah

Permasalahan yang terkait dengan aspek geografis dan potensi sumber daya alam di Kabupaten Tanah Datar antara lain adalah:

1. Secara geografis Kabupaten Tanah Datar terletak tepat di tengah Provinsi Sumatera Barat, namun posisi strategis tersebut belum diikuti oleh aksesibilitas yang memadai karena pengaruh topografi daerah yang cenderung berbukit-bukit dan lembah yang curam serta luasnya cakupan wilayah.
2. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.
3. Belum optimalnya pemanfaatan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dalam perencanaan pembangunan.
4. Masih adanya keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal yang dimiliki daerah, karena terkendala kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan menyebar di berbagai lokasi serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis.
5. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
6. Masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

7. Belum tuntasnya regulasi untuk legalitas perencanaan pengelolaan lingkungan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan Danau Singkarak sehingga belum dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam mengaplikasikan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Adanya keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan kawasan Lembah Anai.
9. Adanya potensi sumberdaya alam dan energi terbarukan yang belum terakomodasi dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031.
10. Sebagian besar daerah berada pada kawasan rawan bencana alam, sehingga memiliki resiko tinggi dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di kawasan tersebut.

2. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Permasalahan makro yang terkait aspek demografi dan potensi SDM diantaranya adalah:

1. Masih dijumpai pengangguran tersembunyi.
2. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
4. Masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan.
5. Belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
6. Masih belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).
7. Masih adanya keterbatasan peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari masih terbatasnya kemampuan meningkatkan nilai IPM.
8. Masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja.
9. Belum tersedianya kebijakan dalam menghadapi era bonus demografi di daerah.

3. Aspek Infrastruktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang terkait dengan aspek infrastruktur, transportasi dan komunikasi di Kabupaten Tanah Datar antara lain adalah :

1. Kondisi Kabupaten Tanah Datar rawan bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, banjir bandang/galodo dan longsor mengakibatkan rentannya kerusakan terhadap infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, drainase dan air bersih).
2. Infrastruktur jalan belum memadai, selain masalah kualitas dan memiliki jurang terjal dan dalam sehingga menyulitkan untuk meningkatkan akses perekonomian masyarakat dan cenderung menghambat percepatan pembangunan pada sektor prioritas seperti pertanian, industri dan pariwisata.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan antar daerah dalam wilayah kabupaten.
4. Cakupan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan masih terbatas.
5. Masih terdapat sejumlah rumah tidak layak huni, yang disebabkan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.
6. Kondisi kualitas dan kuantitas drainase belum memadai sehingga berpotensi terjadi genangan air yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
7. Masih terbatasnya sarana prasarana sanitasi permukiman.
8. Belum jelasnya batas administrasi dalam Kota Batusangkar, antar nagari dalam kecamatan, dan antar kecamatan dalam kabupaten, serta antar kota/kabupaten dalam provinsi.
9. Belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh karena pertumbuhan daerah masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten dan kecamatan.
10. Masih adanya wilayah di Kabupaten Tanah Datar yang belum terlayani oleh jaringan Komunikasi dan Informatika.

4. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat

Permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan masalah sentral dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang pada muaranya adalah meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, adapun masalah yang terakit dengan hal ini diantaranya adalah:

1. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2014 karena masih rendahnya realisasi investasi, dan daya dorong ekonomi masyarakat
2. Lapangan usaha pertanian mendominasi dalam kontribusi PDRB tetapi belum mampu mendorong terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.
4. Masih lemahnya keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih terbatasnya kemampuan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal.
5. Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
6. Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
7. Belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional.
8. Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
9. Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
10. Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.
11. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
12. Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.
13. Masih terbatasnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah.
14. Masih banyaknya lembaga keuangan yang belum berbadan hukum dan memenuhi standar kesehatan lembaga keuangan.
15. Masih adanya koperasi yang tidak aktif.

5. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

Masalah yang dihadapi dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. Kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan.
3. Belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
7. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
8. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.
9. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah.
10. Masih terjadi kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

6. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Aspek sistem inovasi dan teknologi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting karena keterbatasan sumberdaya alam akan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutannya. Masalah utama yang dihadapi dalam aspek ini diantaranya adalah:

1. Masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.
2. Masih terbatasnya fasilitas untuk pengembangan dan alih teknologi.
3. Belum adanya jaringan kerjasama untuk pengembangan inovasi dan teknologi.
4. Belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inovasi dan alih teknologi di tingkat Kabupaten (system inovasi daerah).

5. Belum optimalnya peran lembaga litbang dari perguruan tinggi yang ada di daerah ini.
6. Belum optimalnya pemanfaatan TTG (teknologi Tepat Guna) yang telah dikembangkan oleh POSYANTEK yang ada.

1.4.2 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan di daerah Kabupaten Tanah Datar secara umum adalah:

1. Berkurangnya pemahaman agama, akhlak, budi pekerti dan tatanan kehidupan serta terjadinya pergeseran nilai ditengah masyarakat yang berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas.
2. Kualitas dan akses pendidikan masih perlu dioptimalkandalam rangka peningkatan kualitas SDM.
3. Kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kesehatan lingkungan masih belum optimal.
4. Masih adanya penduduk miskin yang disebabkan antara lain oleh masih adanya pengangguran dan rendahnya tingkatan pendapatan.
5. Kualitas pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
6. Masih rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang daerah, seperti terminal, pasar dan sistem transportasi sehingga menyebabkan belum terdorongnya aktivitas ekonomi masyarakat secara optimal.
7. Masih rendahnya keterkaitan antar lapangan usaha dan daya dorong terhadap produktivitas.
8. Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah.
9. Masih relatif rendahnya kinerja pembangunan terutama di kawasan perdesaan yang disebabkan kualitas SDM, sarana infrastruktur perdesaan, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan, lemahnya kelembagaan perdesaan.
10. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan mengakibatkan belum terwujud sepenuhnya *good*

governance (tata kelola yang baik) dan tata pemerintahan yang bersih, santun dan melayani.

11. Belum optimalnya aplikasi konsep perencanaan pembangunan partisipatif yang berbasis budaya Minangkabau dan berwawasan lingkungan.

Adapun isu strategis sesuai aspek pembangunan yang telah disampaikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

2. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dengan rasio ketergantungan sebesar 59,47 %, tetapi tingkat pengangguran

cenderung fluktuatif, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.

2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing SKPD.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

3. Aspek Infrastruktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan daftar permasalahan yang dapat diidentifikasi tersebut, maka dirumuskan isu strategisnya yaitu:

1. Untuk dapat mendorong mobilitas dan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan daerah, maka diperlukan peningkatan kualitas infrastuktur (jalan, jembatan, irigasi, drainase dan air bersih) dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mengantisipasi berbagai kerawanan bencana alam di daerah.
2. Untuk meningkatkan intensitas dan konektivitas antar daerah dalam kabupaten dan antar kota/kabupaten diperlukan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan lalu lintas yang memenuhi standar kelayakan angkutan umum baik antar nagari maupun antar kota dalam provinsi termasuk penataan dan kepastian aturannya.
3. Dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan kewaspadaan terhadap berbagai bencana maka diperlukan penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang memenuhi persyaratan sanitasi, drainase, pelayanan air bersih dan daya terpasang listrik yang berbasis mitigasi bencana.
4. Untuk menciptakan wilayah administrasi yang memiliki kekuatan hukum maka diperlukan penetapan peraturan daerah tentang batas administrasi

nagari, batas administrasi dengan daerah kota dan kabupaten tetangga dengan mempertimbangkan implikasi sosial budaya dan ekonominya di tengah masyarakat

5. Untuk mendorong percepatan perluasan pembangunan daerah maka perlu dilakukan percepatan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan cepat tumbuh daerah dengan mempertimbangkan potensi kawasan strategis daerah dan konektivitas serta korelasi eksternal antar kawasan pengembangan.
6. Peningkatan dan pemerataan fasilitas serta akses informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan yang semakin meluas di tengah masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan daya saing baik sumberdaya manusia maupun komoditas lokal yang dihasilkan dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.

4. Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan penguatan fundamental makro ekonomi daerah, peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.
2. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
3. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan vokasional (kejuruan) berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
4. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk

dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.

5. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
6. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
7. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.
8. Perlunya pemberdayaan dan peningkatan Kapasitas kelembagaan petani dan pembudidaya ikan agar dapat berperan optimal dalam aktivitas *on farm* maupun *off farm* dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat.

5. Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah:

1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada SKPD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarustamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

6. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Isu strategis yang dirumuskan terkait dengan masalah pembangunan dalam aspek ini adalah:

1. Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas POSYANTEK (Pusat Layanan Teknologi), dan Balai Benih Ikan (BBI) dalam upaya pengembangan menjadi PAT (Pusat Alih Teknologi) sehingga dapat mendorong tumbuh kembangnya adaptasi teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif di daerah.
2. Diperlukan adanya pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga riset perguruan tinggi dan lembaga riset nasional untuk pengembangan inovasi daerah dalam mengembangkan ekonomi berbasis iptek dan sumberdaya lokal.
3. Diperlukan pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendorong peningkatan kemampuan teknologi, daya inovasi dan kreativitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka menghadapi persaingan ekonomi di era globalisasi dan persaingan bebas.
4. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi komunikasi dan informasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.

Sebagai gambaran pelaksanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2016, disusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016, dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan kondisi umum Daerah serta organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV: PENUTUP.

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran langkah yang akan dilakukan oleh organisasi dimasa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Organisasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja tahun 2016.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Visi, misi, agenda dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, dan tujuan serta sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

1. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengkomodifikasi visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah:

VISI

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI,
BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI
SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH ”

Adapun yang dimaksud dengan :

- **Madani** adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat, budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
- **Sejahtera** adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman, untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.
- **Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

2.1.2 Kebijakan Umum Daerah dan Prioritas Pembangunan

1. Kebijakan Umum Daerah

Kebijakan Umum Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 yang sekaligus ditetapkan menjadi 4 (empat) Gerakan Terpadu Unggulan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan
2. Peningkatan pembangunan pertanian
3. Peningkatan dan pengembangan pariwisata
4. Peningkatan Pelayanan publik

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mencapai Visi dan Misi pemerintah Tahun 2016-2021 ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 yaitu:

1. Peningkatan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan;
4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan;
5. Peningkatan infrastruktur daerah;
6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

7. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.1.3 Tujuandan Sasaran

Berdasarkan visi, misi dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI
TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN
SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK,
SYARAK BASANDI KITABULLAH

MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI 1: Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya	1 . Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya	1 . Meningkatkan pemahaman ajaran agama di tengah-tengah masyarakat
		2 . Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dan alim ulama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat
		3 . Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat.
		4 . Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya.
MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat cerdas,	1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Meningkatkan perilaku positif siswa, pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua

MISI	TUJUAN	SASARAN
berkarakter dan sejahteraberdasarkan falsafah ABS-SBK		2 Meningkatkan · perluasan dan pemerataan akses pendidikan
		3 Meningkatkan mutu · layanan dan lulusan serta tata kelola pendidikan
	2. Meningkatkan kesadaran, kemauandankemampuanhidup sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	3. Meningkatkanpembangunankependudukan dankeluarga berencana	Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana
	4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dananak	Meningkatnya perlindunganterhadap perempuan dan anak
	5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta dan partisipasimasyarakat dalam pembangunan
	6. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Menurunnya jumlah · pendudukmiskin dan pengangguran terbuka 2 Pemberdayaan · Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial
MISI 3: Mewujudkankehidupan yang harmonis, amandan teratur dengan tata pemerintahanyang baik, bersih dan profesional.	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraanpemerintahan	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. 2 Meningkatkan · transparansi informasi public
	2. Meningkatkanharmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum
	3. Mengoptimalkan kemampuankeuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah	Meningkatnyakemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
MISI 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan	1 Meningkatkan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan dan pemukiman

MISI	TUJUAN		SASARAN
dan berwawasan lingkungan	2 .	Meningkatkan pengelolaan tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam	1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
			2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
	3 .	Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana
2. Meningkatnya kesiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran			
MISI 5: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah	1 .	Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang mengandalkan produk unggulan dan potensi sumber daya daerah
	2 .	Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah dan nasional	Meningkatnya kunjungan wisatawan

2.2 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 yang telah dibuat berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016.

Pada tahun 2016, dalam rangka penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Datar serta menindak lanjuti Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, telah dilakukan

penyempurnaan terhadap dokumen SAKIP Pemerintah Kabupaten dan SKPD Kabupaten Tanah Datar. Penyempurnaan dimaksud dilaksanakan oleh Tim

SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor: 065/ 76 /ORG-2017 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016.

Penyempurnaan dilakukan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang masih berorientasi *output* menjadi indikator kinerja berorientasi *outcome*. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang disempurnakan dimaksud, dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

**HASIL PENYEMPURNAAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2016**

No	Sasaran Strategis (Sebelum Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Sebelum Disempurnakan)	Sasaran Strategis (Setelah Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Setelah Disempurnakan)	Ket	
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1.1	1	Meningkatnya pengamalan ajaran agama Islam	1.2	Penyempurnaan sasaran
		1.2			1.1	Indikator kinerja disempurnakan
		1.3				Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		1.4				
2	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya.	2.1	2	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai adat dan budaya		Penyempurnaan sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		2.2				
					2.1	Dimunculkan Indikator kinerja baru
3	Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	3.1				Sasaran dan indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		3.2				

No	Sasaran Strategis(Sebelum Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Sebelum Disempurnakan)	Sasaran Strategis(Setelah Di sempurnakan)	Indikator Kinerja (Setelah Di sempurnakan)	Ket	
		yang dibantu				
4	Meningkatnya mutu, pemerataan dan relevansi pendidikan	4.1 Persentase tamatan SMA/MA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri	3	Meningkatnya mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Penyempurnaan sasaran dan beberapa Indikator Dikembalikan ke SKPD
		4.2 Meningkatnya APM : ✓ SD/MI ✓ SMP/MTs ✓ SMA/MA/SMK			3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) • SD/MI • SMP/MTs	Indikator kinerja disempurnakan
		4.3 Meningkatnya APK : ✓ SD/MI ✓ SMP/MTs ✓ SMA/MA/SMK				Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		4.4 Rasio ketersediaan sekolah dibagi pendidikan usia sekolah - SD/MI - SMP/MTs				
		4.5 Angka Kelulusan (AL) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA				
		4.6 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				
		4.7 Angka rata-rata lama sekolah			3.2 Angka rata – rata lama sekolah (tahun)	
					3.3 Persentase penduduk Melek Huruf usia diatas 15 tahun	Dimunculkan indikator kinerja baru
		4.8 Peningkatan lulusan SMA/MA/SMK yang diserap di dunia kerja				Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		4.9 Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat •Persentase pengunjung ke Perpustakaan daerah •Persentase pengunjung ke				

No	Sasaran Strategis(Sebelum Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Sebelum Disempurnakan)	Sasaran Strategis(Setelah Di sempurnakan)	Indikator Kinerja (Setelah Di sempurnakan)	Ket
		Perpustakaan keliling			
5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	5.1 Persentase Karang taruna aktif			Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		5.2 Jumlah Pemuda Pelopor yg berpartisipasi dalam pembangunan daerah			
6	Meningkatnya aktivitas keolahraagaan	6.1 Event olahraga yang dilaksanakan maupun yang diikuti			Sasaran dan Indikator Dikembalikan ke SKPD
		6.2 Atlet yang berprestasi (orang)			
		6.3 Olahraga yang berkembang dimasyarakat yang difasilitasi			
		6.4 Organisasi cabang Olahraga yang dibina			
7.	Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk	7.1 Angka Harapan Hidup	4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		7.2 Angka kematian ibu melahirkan			4.1 Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
		7.3 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup			4.2 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
		7.4 Persentase masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan			4.3 Persentase kepersertaan Masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
		7.5 Penurunan angka gizi kurang pada Balita			Dikembalikan ke SKPD
		7.6 Cakupan Desa Siaga Aktif			Dikembalikan ke SKPD
			5	Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana	5.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga
					Sasaran dan indikator kinerja baru

No	Sasaran Strategis(Sebelum Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Sebelum Disempurnakan)	Sasaran Strategis(Setelah Di sempurnakan)	Indikator Kinerja (Setelah Di sempurnakan)	Ket	
8	Meningkatnya taraf hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial masyarakat	8.1	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social			Sasaran dan indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		8.2	Persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan social			
		8.3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun			
		8.4	Persentase jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis			
9	Berkembangnya pasar sebagai sentra perdagangan.	9.1	Persentase pasar layak bagi perdagangan			Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
10	Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	10.1	Persentase Pertumbuhan UMKM			
		10.2	Persentase Jumlah Koperasi yang berkualitas			
		10.3	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi.			
11	Meningkatnya kualitas dan produksi berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	11.1	Produksi/ketersediaan pangan utama(Ton): a. Padi b. Jagung c. Kacang Tanah d. Cabe e. Tomat f. Buncis			

No	Sasaran Strategis(Sebelum Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Sebelum Disempurnakan)	Sasaran Strategis(Setelah Di sempurnakan)	Indikator Kinerja (Setelah Di sempurnakan)	Ket	
		g. Wortel				
12	Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran.	12.1	10	Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan	10.1	Dimunculkan sasaran baru dengan penambahan satu indikator kinerja
		12.2			10.2	
13	Berkembangnya kepariwisataan daerah	13.1	11	Meningkatnya kunjungan wisatawan	11.1	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata (orang)
14	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	14.1	8	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	8.1	Penyempurnaan sasaran dan indikator
		14.2			8.2	
15	Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi	15.1	9	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	9.1	Penyempurnaan sasaran dan indikator
16	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	16.1				Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
17	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup	17.1				Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		17.2				
		17.3				
		17.4				
		17.5				
18	Meningkatnya	18.1				Sasaran dan

No	Sasaran Strategis(Sebelum Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Sebelum Disempurnakan)	Sasaran Strategis(Setelah Di sempurnakan)	Indikator Kinerja (Setelah Di sempurnakan)	Ket
	pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana				Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		18.2	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana <ul style="list-style-type: none"> • Satgas bencana nagari • kelompok siaga bencana sekolah(KSS) 		Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		18.3	Tingkat waktu tanggap (response time rate)		
19	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	19.1	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana		Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
20	Meningkatnya pengurangan resiko bencana dan pemulihan kawasan/daerah pasca bencana	20.1	Persentase kejadian bencana yang dapat dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana		Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
21	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur	21.1	Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas		Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		21.2	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan		
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	22.1	Persentase penduduk yang memiliki e-KTP		Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		22.2	Cakupan penerbitan kartu tanda		

No	Sasaran Strategis (Sebelum Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Sebelum Disempurnakan)	Sasaran Strategis (Setelah Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Setelah Disempurnakan)	Ket	
		penduduk (KTP)				
		22.3 Kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk				
		22.4 Jumlah unit pelayanan yang SKM berkategori baik				
		22.5 Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu				
		22.6 Persentase Pelaksanaan PATEN di Kecamatan				
23	Terwujudnya transparansi pelayanan	23.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD	
		23.2 Persentase SKPD mengisi data dan informasi di website resmi pemerintah				
		23.3 Sistem Aplikasi Informasi Pemerintah Daerah Secara Elektronik				
24	Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih, dan akuntabel	24.1 Persentase tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP	7	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	7.2 Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengembalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penyempurnaan indikator kinerja
		24.2 Persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan inspektorat				Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		24.3 Opini BPK terhadap LKPD			7.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Penyempurnaan indikator kinerja
		24.4 Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah				Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD

No	Sasaran Strategis(Sebelum Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Sebelum Disempurnakan)	Sasaran Strategis(Setelah Di sempurnakan)	Indikator Kinerja (Setelah Di sempurnakan)	Ket
		daerah (LPPD)			
		24.5 Peringkat hasil evaluasi Akuntabilitas kerja pemerintah daerah		7.4 Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Penyempurnaan indikator kinerja
		24.6 Penyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran			Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		24.6 Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke - yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah			
		24.7 Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD			Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		24.8 Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu			
				7.3 Persentase UKPP yang memiliki Hasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik	Indikator kinerja baru
				7.4 Penerapan e-government yang terintegrasi	Indikator kinerja baru
			6 Meningkatkan penegakan dan kepastian hukum	6.1 Rasio Angka kriminalitas	Dimunculkan sasaran dan indikator kinerja baru
25	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan	25.1 Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan : - Peraturan daerah - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati			Sasaran dan Indikator kinerja dikembalikan ke SKPD
		25.2 Cakupan Penegakan			

No	Sasaran Strategis(Sebelum Disempurnakan)	Indikator Kinerja (Sebelum Disempurnakan)	Sasaran Strategis(Setelah Di sempurnakan)	Indikator Kinerja (Setelah Di sempurnakan)	Ket
	masyarakat	Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			
		25.3 Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			
		25.4 Cakupan rasio petugas Linmas			

2.3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016

Berdasarkan penyempurnaan pada tabel 2.2 telah dilakukan perubahan/penyempurnaan dokumen akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu pada dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016. Hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Kemendagri RB RINomor B/76/AA.05/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016.

Adapun langkah-langkah peningkatan penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan antara lain :

1. Pernyataan komitmen Pimpinan Daerah dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi pada tanggal 21 Februari 2017 di Jakarta untuk perbaikan dan peningkatan manajemen Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kabupaten Tanah Datar dimulai dari tanggal pernyataan komitmen.
2. Mereviu Indikator Kinerja Utama yang disesuaikan dengan sasaran pada dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021.
3. Melakukan penyesuaian Indikator Kinerja yang pada saat ini masih berorientasi keluaran suatu kegiatan (*Out put*) menjadi berorientasi hasil yang bermanfaat bagi masyarakat (*Out Come*).
4. Mengalihkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, karena masih bersifat *output*.

5. Menyusun Perjanjian Kinerja Pimpinan Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan hasil reviu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanah Datar yang terakhir.

Perubahan atau Penyempurnaan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Baru (Setelah Disempurnakan)		Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pengamalan ajaran agama Islam	1.1	Jumlah hafidz Alquran	1000 orang	Bagian Kesra Setda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.2	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kab. Tanah Datar	5%	Bagian Kesra, Bagian Perekonomian Setda, BAZ Tanah Datar
2	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	2.1	Persentase Nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat	5%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan Dinas PMDPPKB
3.	Meningkatnya mutu Pendidikan	3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) <ul style="list-style-type: none"> • SD/MI • SMP/MT 	90,89% 81,73%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.2	Angka rata – rata lama sekolah (tahun)	8,03	
		3.3	Persentase penduduk Melek Huruf usia diatas 15 tahun	98,76%	
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	321	Dinas Kesehatan, RSUD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Baru (Setelah Disempurnakan)		Target	SKPD Penanggung Jawab
		4.2	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	14,44	
		4.3	Persentase kepesertaan Masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	66,80%	
5.	Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana	5.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	Dinas PMDPPKB
6.	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum	6.1	Rasio Angka kriminalitas	10,05	Satpol PP Damkar, Kesbangpol, Bagian Hukum Setda
7.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	7.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat
		7.2	Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Inspektorat
		7.3	Persentase UKPP yang memiliki Hasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik	26 %	Bagian Organisasi Setda
		7.4	Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	Baperlitbang, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda
		7.5	Penerapan e-government yang terintegrasi	N/A	Dinas kominfo
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	8.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	55 %	Dinas PU
		8.2	Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik	54 %	Dinas PU
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Irigasi	9.1	Persentase irigasi berkondisi baik	60 %	Dinas PU, Dinas pertanian
10.	Meningkatnya Kesejahteraan	10.1	PDRB Perkapita (dalam juta Rp)	30,82	Baperlitbang, Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Baru (Setelah Disempurnakan)		Target	SKPD Penanggung Jawab
	masyarakat				Koperindag, Dinas PMPTSP Naker, Bagian Perekonomian Setda
		10.2	Penurunan angka Kemiskinan	5,23%	Baperlitbang, Dinas Sosial PPPA
11.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	11.1	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata (orang)	1juta	Dinas Parpora, Dinas PU, Dinas Koperindag, Satuan Pol PP Damkar

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A AkuntabilitaskinerjaPemerintahKabupaten Tanah Datar Tahun2016 adalah perwujudankewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menilaipelaksanaan program dan kegiatanyangtelahditetapkandalamAnggaran

Pendapatan BelanjaDaerah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mencapai visi dan misipemerintahdaerah yang ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 secara terukur, melalui indikator kinerja pada sasaran strategis berdasarkan penetapan kinerja pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 dan penyesuaiannya. Akuntabilitaskinerja ini mencakup 11 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja pada sasaran strategis berdasarkan penetapan kinerja pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 dan penyesuaiannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja pada sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja pada sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian 22 indikator kinerja utama untuk mewujudkan 11 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
HASIL PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Baru (Setelah Disempurnakan)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pengamalan ajaran agama Islam	1.1	Jumlah hafidz Alquran	1000 orang	1000	100%	Bagian Kesra Setda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.2	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kab. Tanah Datar	5%	7,78%	155,70%	Bagian Kesra, Bagian Perekonomian Setda
2	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	2.1	Persentase Nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat	5%	9,33%	186,6%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan Dinas PMDPPKB

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Baru (Setelah Disempurnakan)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.	Meningkatnya mutu Pendidikan	3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) <ul style="list-style-type: none"> SD/MI SMP/MTs 	90,89% 81,73%	92,22% 82,92%	101,46% 101,46%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.2	Angka rata - rata lama sekolah (tahun)	8,03	7,93	98,76%	
		3.3	Persentase penduduk Melek Huruf usia diatas 15 tahun	98,76%	98,72%	99,96%	
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	321	91,72	351,70%	Dinas Kesehatan, RSUD
		4.2	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	14,44	11,77	122,34%	
		4.3	Persentase kepersertaan Masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	66,80%	62,17%	93,06%	
5.	Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana	5.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,62	103,05	Dinas PMDPPKB
6.	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum	6.1	Rasio Angka kriminalitas	10,05	18,52	54,26%	Satpol PP Damkar, Kesbangpol, Bagian Hukum Setda
7.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	7.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100%	Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat
		7.2	Tingkat kematangan implementasi Sistem	Level 2	Level 2	100%	Inspektorat

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Baru (Setelah Disempurnakan)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
		7.3	Persentase UKPP yang memiliki Hasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik	26 %	26,8%	103,08%	Bagian Organisasi Setda
		7.4	Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	CC	92,05%	Baperlitbang, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda
		7.5	Penerapan e-government yang terintegrasi	N/A	N/A	N/A	Dinas kominfo
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	8.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	55 %	57,39%	104,35%	Dinas PU
		8.2	Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik	54 %	33,33%	61,72%	Dinas PU
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	9.1	Persentase irigasi berkondisi baik	60 %	45,13%	75,22%	Dinas PU, Dinas pertanian
10	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	10.1	PDRB Perkapita (dalam juta Rp)	30,82	32,77	106,33%	Baperlitbang, Dinas Koperindag, Dinas PMPTSP Naker, Bagian Perekonomian Setda
		10.2	Penurunan angka Kemiskinan	5,23%	5,82	89,86%	Baperlitbang, Dinas Sosial PPPA
11	Meningkatnya kunjungan wisatawan	11.1	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata	1.000.000 orang	1.189.439 orang	118,9%	Dinas Parpora, Dinas PU,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Baru (Setelah Disempurnakan)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(orang)				Dinas Koperindag, Satuan Pol PP Damkar

Dari tabel 3.2.1 dapat dilihat, capaian rata-rata 22 (dua puluh dua) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 119,99%. Capaian indikator kinerja terendah yaitu, indikator kinerja rasio angka kriminalitas sebesar 54,26% untuk mengukur sasaran strategis Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum sedangkan Capaian Indikator tertinggi adalah indikator Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup sebesar 351,70% untuk mengukur sasaran strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3.3. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Misi 1 Meningkatkan Pemahaman Dan Pengalaman Agama, Adat Dan Budaya

Substansi utama dari misi ini menjadikan agama, adat dan budaya sebagai pegangan dalam tataran kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Nilai yang tertanam adalah bagaimana upaya untuk menerapkan kehidupan beragama dan berbudaya melalui pendidikan yang mengajarkan pemahaman dan pengamalan yang harus berdasarkan kepada ajaran agama Islam dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang berarti Adat berdasarkan agama Islam dan agama Islam berpedoman kepada Al Quran.

Untuk mewujudkan misi tersebut, sesuai dengan penetapan kinerja pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 dan penyesuaiannya, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Misi 1

Tujuan		Sasaran Strategis	
1.1	Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya	1.1.1	Meningkatnya pengamalan ajaran agama Islam
		1.1.2	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

Analisis capaian indikator kinerja per sasaran strategis dari misi 1 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1.1 Meningkatkan Nilai-Nilai Kehidupan Yang Islami, Beradat Dan Berbudaya

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1.1.1 **Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Islam**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah hafidz Alquran	1000	1000	100%
2.	Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun pada BAZ Kab.Tanah Datar	5%	7,78%	155,70%
	Rata-rata capaian			128%

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pengamalan ajaran agama Islam sebesar 128%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran termasuk dalam kategori **sangat baik**.

1. Jumlah Hafidz Alquran

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, indikator kinerja Jumlah hafidz Alquran ditargetkan 1000 orang dengan realisasi 1000 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja jumlah hafidz Al Quran dihitung sebagai berikut:

jumlah hafidz Al Quran	jumlah masyarakat/siswa Tanah Datar yang hafal Al Quran, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah	= 1000
------------------------	---	--------

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja jumlah hafidz Al Quran tahun 2015-2016 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Hafidz Alquran Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (kondisi awal)	Target	Realisasi	Capaian
		2015	2016	2016	2016
1	Jumlah hafidz Alquran	325	1.000	1.000	100%

Dari tabel 3.3.3 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja jumlah hafidz Alquran menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan adanya program Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Pelaksanaan kegiatan untuk menunjang visi dan misi tersebut berupa gerakan seribu hafidz. Dampak dari kegiatan gerakan seribu hafidz ini antara lain, timbulnya keinginan dari masyarakat untuk menghafal Alquran ditandai dengan berdirinya rumah-rumah tahfidz yang dikelola secara swadaya serta berkembangnya kegiatan-kegiatan menghafal Al Quran melalui TPA/TPSA dan pendidikan formal di sekolah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk dapat meningkatkan capaian kinerja indikator jumlah hafidz Alquran antara lain :

1. Meningkatkan Kompetensi Guru TPA/TPSA melalui Sertifikasi.

2. Melakukan Akreditasi TPA/TPSA di Kabupaten Tanah Datar.
3. Memberikan Insentif dan Reward kepada Hafizd yang sudah mencapai tingkatan tertentu.
4. Memberikan bantuan kepada rumah Tafizd, Ulama Nagari dan pondok Al Quran.

Program pendukung pencapaian indikator kinerja jumlah hafidz Alquran adalah program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan:

1. Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.153.288.000,- dengan realisasi Rp. 138.235.206,- atau 90,18%.
2. Fasilitasi dan pembinaan guru TPA, imam dan garin masjid se Kabupaten Tanah Datar, Anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.3.754.200.000,- dengan realisasi Rp.3.728.349.750,- atau 99,31%.

2. Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun pada BAZ Kabupaten Tanah Datar

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat indikator persentase peningkatan zakat yang terhimpun pada BAZ Kabupaten Tanah Datar, target 5% yang terealisasi 7,78% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 155,70%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan zakat yang terhimpun pada BAZ Kabupaten Tanah Datar dihitung sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun pada BAZ Kabupaten Tanah Datar	$\frac{\text{Rp.9587.841.432,-} - \text{Rp.8.895.355.470,-}}{\text{Rp.8.895.355.470,-}} \times 100\%$	= 7.78%
--	---	----------------

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja persentase peningkatan zakat yang terhimpun pada BAZ Kabupaten Tanah Datar tahun 2015-2016 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.4

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun pada BAZ Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian Kinerja (%)	
		2015	2016	2015	2016
1	Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun pad BAZ Kabupaten Tanah Datar	1,61%	7,78%	61,68%	155,70%

Dari tabel 3.3.4 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja persentase peningkatan zakat yang terhimpun di BAZ Kabupaten Tanah Datar menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan kinerja tahun 2015. Untuk tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 5% terealisasi sebesar 7,78% dengan capaian kinerja 155,70%.

Peningkatan yang signifikan ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat yang sebelumnya hanya Pegawai Negeri Sipil saja untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat. Berdasarkan himbauan dari kepala daerah yang disampaikan melalui pertemuan-pertemuan formal/ informal kepala daerah dengan PNS, pengusaha dan masyarakat serta radio Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan zakat yang terhimpun di BAZ Kabupaten Tanah Datar pemerintah daerah tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Tanah Datar melalui hibah ke BAZ Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasikan sebesar Rp. 300.000.000,- atau 100%.

**SASARAN STRATEGIS 1.1.2
Meningkatnya Pengamalan Adat dan Budaya**

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategismeningkatnya pengamalan nilai-nilai adat dan budaya terdiri dari satu indikator kinerja utama dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.5
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.2**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-----	-------------------	--------	-----------	---------

1	Persentase Desa/Nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat	5%	9,33%	186,6%
---	--	----	-------	--------

Dari tabel 3.3.5 dapat dilihat, indikator kinerja persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat, target 5% yang terealisasi 9,33% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 186,6% termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja, persentase desa/nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat diukur dari ketersediaan peraturan nagari (pernag) yang berkaitan dengan adat dan budaya sebagai berikut:

Persentase Desa/Nagari dengan Kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat	7 Nagari dengan Kategori Baik	x 100%	= 9.33%
	75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar		

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja persentase desa/nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat tahun 2015- 2016 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Desa/Nagari Dengan Kategori Baik Dalam Penerapan Adat Dan Budaya Pada Kehidupan Bermasyarakat Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian Kinerja (%)	
		2015	2016	2015	2016
1	Persentase Desa/Nagari dengan Kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat	9,33%	9,33%	186,6%	186,6%

Dari tabel 3.3.6 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja persentase desa/nagari dengan kategori sangat baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat menunjukkan *trend* yang konsisten.

Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa/nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat adalah program pengembangan nilai budaya dengan kegiatan pelestarian dan aktualisasi budaya daerah. Anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk

program ini sebesar Rp. 730.925.000,- dengan realisasi Rp. 714.512.850,- atau 97,75%.

Misi2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Sejahtera Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Sarak-Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Untuk mencapai misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2021 telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan misi ini adalah:

**Tabel 3.3.7
Tujuan dan Sasaran Strategis Misi 2**

Tujuan		Sasaran Strategis	
2.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	2.1.1	Meningkatnya mutu pendidikan
		2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		2.1.3	Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana

Analisis pencapaian indikator kinerja persasaran strategis misi 2 adalah sebagai berikut:

Tujuan 2.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 2.1.1
Meningkatnya Mutu Pendidikan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan, realisasi dan pencapaian indikator kinerja tersebut tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3.8
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.1**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Angka Partisipasi Murni (APM) • SD/MI • SMP/MTs	90,89%	92,22%	101,46%
		81,73%	82,92%	101,46%
2	Angka rata – rata lama sekolah	8,03	7,93	98,76%
3	Persentase penduduk Melek Huruf usia diatas 15 tahun	98,76%	98,72%	99,96%
	Rata-rata capaian kinerja			100,41%

Dari tabel 3.3.8 dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1 sebesar 100,41%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1.1 termasuk dalam kategori **sangat baik**.

1. Angka Partisipasi Murni atau APM (SD/MI, SMP/MTs)

a. Angka Partisipasi Murni SD/MI

Dari tabel 3.3.8 dapat dilihat, target indikator kinerja persentase APM SD/MI adalah sebesar 90,89%, yang terrealisasi 92,22% dengan tingkat capaian 101,46%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja persentase angka partisipasi murni (APM) SD/MI dihitung sebagai berikut:

persentase APM SD/MI	36.743 Penduduk usia 7 s.d 12 tahun yang sekolah	x 100%	= 92.22%
	39.834 Penduduk usia 7 s.d 12 tahun di Tanah Datar		

Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase APM SD/MI tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja APM SD/MI
Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian Kinerja (%)	
		2015	2016	2015	2016
1	APM SD/MI	90,67%	92,22%	92,92%	101,46%

Dari tabel 3.3.9 dapat dilihat bahwa hasil capaian kinerja tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar

8,54%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar di tingkat SD/MI.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Dari tabel 3.3.8 dapat dilihat, target indikator kinerja persentase APM SMP/MTs adalah sebesar 81,73%, yang terealisasi 82,92% dengan tingkat capaian 101,46%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja persentase angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs dihitung sebagai berikut:

persentase APM SMP/MTs	15.981 Penduduk usia 12 s.d 15 tahun yang sekolah	x 100%	= 82.92%
	19.272 Penduduk usia 13 s.d 15 tahun di Tanah Datar		

Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase APM SMP/MTs tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja APM Pendidikan SMP/MTs
Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian Kinerja (%)	
		2015	2016	2015	2016
1	Persentase APM SMP/MTs	81,69%	82,92%	103,27%	101,46%

Dari tabel 3.3.10 dapat dilihat, bahwa hasil capaian kinerja tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 1,81%. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi Kabupaten Tanah Datar berbatasan langsung dengan 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sehingga banyak penduduk Kabupaten Tanah Datar usia 13 s.d 15 tahun yang bersekolah di Kabupaten/Kota tetangga.

2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

Dari tabel 3.3.8 dapat dilihat, target indikator kinerja persentase angka rata-rata lama sekolah adalah target sebesar 8,03%, terealisasi 7,39% dengan tingkat capaian 98,76%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja persentase angka rata-rata lama sekolah dapat berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Realisasi dan capaian indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.11

Tabel 3.3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Angka rata-rata lama sekolah	N/a	7,93	N/a	98,76%

Dari tabel 3.3.11 dapat dilihat, target indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 7,93 dengan tingkat capaian 98,76% termasuk kategori penilaian keberhasilan sangat baik, realisasi capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru dimunculkan pada RPJMD tahun 2016-2021.

Belum maksimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor eksternal yaitu pola pikir masyarakat yang masih menginginkan anaknya bekerja sebagai tulang punggung keluarga, sehingga anak yang berumur 15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Faktor internal yaitu anak lebih menginginkan bekerja dalam sektor tertentu karena lebih cepat menghasilkan uang yang mengakibatkan rendahnya keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk dapat meningkatkan capaian kinerja indikator ini adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan.
2. Meningkatkan anggaran operasional sekolah

3. Pelaksanaan program retrieval bagi anak yang terancam putus sekolah
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Persentase penduduk melek huruf usia diatas 15 tahun

Dari tabel 3.3.8 dapat dilihat, target indikator kinerja persentase penduduk melek huruf adalah sebesar 98,76% yang terealisasi sebesar 98,72% dengan tingkat capaian 99,96%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja persentase penduduk melek huruf dihitung sebagai berikut:

Persentase penduduk melek huruf	242.778 Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis	x 100%	= 98,72%
	245.938 Penduduk usia 15 tahun ke atas		

Realisasi dan capaian indikator kinerja angka persentase penduduk melek huruf usia diatas 15 tahun, untuk tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.12

Tabel 3.3.12
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Melek Huruf Usia diatas 15 Tahun, Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian Kinerja (%)	
		2015	2016	2015	2016
1	Persentase penduduk melek huruf usia diatas 15 tahun	98,70%	98,72%	98,70%	99,96%

Dari tabel 3.3.12 dapat dilihat, target indikator kinerja Persentase penduduk Melek Huruf usia diatas 15 tahun sebesar 98,72%, tingkat capaian 99,96%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**. Dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 1,26% yang disebabkan karena tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk pandai membaca dan menulis.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk dapat meningkatkan capaian kinerja indikator ini adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan.
2. Meningkatkan anggaran operasional sekolah
3. Pelaksanaan program retrieval bagi anak yang terancam putus sekolah
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
5. Melaksanakan program pendidikan luar sekolah

Untuk mendukung sasaran meningkatnya mutu pendidikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui program :

1. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan jumlah kegiatan sebanyak 83 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.575.948.595,- yang terealisasi sebesar Rp.12.886.152.455,- atau sebesar 88,45%
2. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.212.658.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.061.814.986,- atau sebesar 87,56%
3. Program pendidikan non formal, dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 438.742.000,- yang teralisasi sebesar Rp. 422.831.600,- atau sebesar 96,37%.

SASARAN STRATEGIS 2.1.2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah tercantum dalam tabel 3.3.13

Tabel 3.3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	321	91,72	351,70%
2.	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	14,44	11,77	122,34%
3.	Persentase kepersertaan Masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	66,80%	62,17%	93,06%
	Rata-rata Capaian			254,34%

Dari tabel 3.3.13 dapat dilihat, bahwa rata-rata capaian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 254,34% termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

1. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

Dari tabel 3.3.13 dapat dilihat, target indikator kinerja angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup adalah sebesar 321 yang terrealisasi sebesar 91,72 dengan tingkat capaian 351,70%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dihitung sebagai berikut:

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	6 orang (jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas waktu tertentu)	x 100.000	= 91,72
	6541 jumlah kelahiran hidup pada waktu yang sama		

Realisasi dan capaian indikator kinerja angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.14

Tabel 3.3.14
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	136,88	91,72	74,51%	351,70%

Dari tabel 3.3.14 dapat dilihat, realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup tahun 2016 capaian kinerja sebesar 351,70% meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 277,19% yang disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan persalinan, yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang bersertifikasi. Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini antara lain:

1. Peningkatan status Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi.
2. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan persalinan.
3. Penambahan Dokter Spesialis Kebidanan di unit pelayanan rujukan.

2. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Dari tabel 3.3.13 dapat dilihat, target indikator kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup adalah sebesar 14,44 yang terrealisasi sebesar 11,77 dengan tingkat capaian 122,34 %, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dihitung sebagai berikut:

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	77 bayi usia 0-11 bulan yang meninggal pada kurun waktu tertentu	x 1.000	= 11,77
	6451 kelahiran hidup pada waktu yang sama		

Realisasi dan capaian indikator kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.15

Tabel 3.3.15
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	13,9	11,77	313,04%	122,34%

Dari tabel 3.3.15 dapat dilihat, realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2016 capaian kinerja sebesar 122,34% menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 190,7% yang disebabkan karena meningkatnya angka kelahiran di tahun 2016 sebanyak 1.397 orang dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan angka kematian bayi di tahun 2016 meningkat sebanyak 5 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mendukung indikator kinerja Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup melalui program:

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.062.857.000,- yang terrealisasi sebesar Rp. 708.906.833,- atau sebesar 66,70%

2. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 40.335.370,- atau sebesar 80,67%
3. Program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dengan jumlah kegiatan sebanyak 23 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.16.900.508.533,- yang terealisasi sebesar Rp. 13.486.426.269,- atau sebesar 79.80%
4. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita pada kegiatan pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia dengan anggaran sebesar Rp. 42.750.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 36.740.400 atau sebesar 85,94%
5. Program penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 24 kegiatan dengan total anggaran Rp. 5.888.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.615.282.752 atau sebesar 78.38%

3. Persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

Daritabel3.3.13dapatdilihat, targetindikatorkinerjapersentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatanadalah sebesar66,80% yangterrealisasisesbesar 62,17%dengantingkat capaian93,06 %,termasukkategori penilaiankeberhasilansangat baik.

Realisasi indikatorkinerjapersentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatandihitung sebagai berikut:

persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan	226.967Penduduk yang telah terdaftar pada SJSN Bidang Kesehatan	x 100%	= 62,17%
	365.040 Penduduk		

RealisasidancapaianindikatorkinerjaPersentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatantahun2015-2016 dapatdilihatpada tabel3.3.16

Tabel3.3.16
RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategisPersentase kepersertaan Masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	63,77%	62,17%	113,46%	93,06%

Daritable 3.3.16 dapat dilihat, target indikator kinerja persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan terelisasi sebesar 65,65%, dengan tingkat capaian 98,28 %, dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 15,18%, secara fakta lapangan terjadi kenaikan jumlah penduduk keseluruhan dari semula tahun 2015 sebesar 362.759 jiwa menjadi tahun 2016 sebesar 365.040 jiwa.

Penurunan ini disebabkan karena angka pembandingan jumlah penduduk yang dipakai tahun 2015 adalah hasil pendataan Badan Pusat Statistik, sementara untuk Tahun 2016 digunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/735/SJ tanggal 13 Februari 2013, hal penyajian dan pemanfaatan data kependudukan.

Dampak dari indikator kinerja Persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar adalah terjaminnya pembiayaan kesehatan untuk pelayanan dasar dan pelayanan rujukan guna mewujudkan *total coverage* pada tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam memberikan sosialisasi pentingnya jaminan kesehatan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan di masyarakat.

Program pendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- yang terealisasi Rp. 44.310.430. atau 98,46%
2. Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dengan kegiatan peningkatan program pemberdayaan dan jaminan kesehatan, dengan

anggaran sebesar Rp. 10.267.482.400,- yang terealisasi Rp. 10.222.539.500,- atau 99,56%.

SASARAN STRATEGIS 2.1.3
Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah tercantum dalam tabel 3.3.17

Tabel 3.3.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Jumlah rata-rata anak dalam keluarga	2,70	2,62	103,05%

Dari tabel 3.3.17 dapat dilihat, bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebesar 103,05%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

1. Jumlah Rata-rata anak dalam keluarga

Dari tabel 3.3.17 dapat dilihat, target indikator kinerja jumlah rata-rata anak dalam keluarga sebesar 2,70, terealisasi 2,62 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,05%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja jumlah rata-rata anak dalam keluarga dihitung berdasarkan data dari BPS

Realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah rata-rata anak dalam keluarga tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.18

Tabel 3.3.18

Jumlah Rata-rata anak dalam keluarga Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Jumlah Rata-rata anak dalam keluarga	2,70	2,62	103,70	103,05

Dari tabel 3.3.18 dapat dilihat, realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah rata-rata anak dalam keluarga tahun 2016 capaian kinerja sebesar 103,05% menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,65% yang disebabkan oleh menurunnya kesadaran masyarakat dalam hal pelaksanaan program keluarga berencana.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pelaksanaan program keluarga berencana serta penyuluhan yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PPKB) dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat jorong.

Program pendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan Anggaran sebesar Rp. 145.317.750,- dan realisasi sebesar Rp. 140.706.600,- atau 96,83%
2. Program Keluarga Berencana dengan kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 126.823.000 dan realisasi sebesar Rp. 125.434.250,- atau 98,90%

Misi 3: Mewujudkan Kehidupan Yang Harmonis, Aman Dan Teratur Dengan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih Dan Profesional

Untuk mewujudkan misi 3 ini, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.19

Tujuan dan Sasaran Strategis Misi 3

Tujuan		Sasaran Strategis	
3.1	Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	3.1.1	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum
3.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional	3.2.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel

Tujuan3.1 Meningkatnya Harmonisasi Dan Rasa Aman Di Tengah Masyarakat

Untukmencapaitujuantersebutdiatas,hasilayangandicapaitelahditetapkandalamsasaranstrategissebagaiberikut:

SASARAN STRATEGIS 3.1.1 Meningkatnya Penegakan dan Kepastian Hukum

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya penegakan dan kepastian hukumterdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:

Tabel.3.3.20
CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis3.1.1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Angka kriminalitas	10,05	18,52	54,26%

Daritabel3.3.20dapat dilihat, capaianindikator kinerjasasaranstrategismeningkatnya penegakan dan kepastian hukum adalah sebesar 54,26%. Sesuaidengan kategoripenilaian keberhasilan/kegagalanyang ditetapkan, keberhasilanpencapaianasaraninitermasuk kategoricukup

1. Rasio Angka kriminalitas

Dari tabel 3.3.20 dapat dilihat, target yang ditetapkan terhadap angka kriminalitas adalah 10,05terrealisasi sebesar 18,52 dengan capaian kinerja sebesar 54,26%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik.

Realisasi indikator kinerja penurunan angka kriminalitas dihitung sebagai berikut:

Rasio Angka Kriminalitas	676 Angka kriminalitas	X 10.000	= 18,52
	365.040 Jumlah penduduk		

Realisasi dan capaian penurunan angka kriminalitas tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.21

Tabel 3.3.21
Rasio Angka Kriminalitas Dari tahun 2015 - 2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Rasio Angka Kriminalitas	18,08	18,52	55,64%	54,26%

Dari tabel 3.3.20 dapat dilihat, realisasi dan capaian indikator kinerja rasio angka kriminalitas tahun 2016 capaian kinerja sebesar 54,26% turun dibandingkan tahun 2015 sebesar 55,64%. Dilihat dari target yang ditetapkan terjadi peningkatan kasus kriminalitas dimana dari 10.000 orang penduduk ditargetkan yang menjadi korban hanya 10 orang, justru yang terjadi dilapangan 18 orang yang menjadi korban kriminalitas.

Rendahnya capaian kinerja dalam penurunan rasio angka kriminalitas disebabkan karena tidak seluruhnya gejala kasus kriminal yang dapat terantisipasi dan diinformasikan kepada pihak terkait, dan kekurangcakapan personil informan dilapangan dan kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh informan.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai antara lain pertama dengan memberdayakan personil informan dengan meningkatkan insentif dan memberikan pelatihan terkait dengan bidang tugasnya, serta menjalin komunikasi yang intensif dengan Komunitas Intelijen Daerah (kominda).

Untuk mencapai indikator kinerja ini, didukung oleh beberapa Program, yaitu:

1. Program penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi sosialisasi peraturan-perundang-undangan
 - b. Sosialisasi produk hukum

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 196.256.000,- dan realisasi sebesar Rp. 162.627.914,- atau 82,86%.

2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :
 - a. Pengendalian keamanan lingkungan
 - b. Fasilitasi komunitas intelijen daerah (KOMINDA)
 - c. Fasilitasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)
 - d. Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 542.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 493.310.568,- atau 90,87%.

3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik ditengah masyarakat.
Dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 206.742.000,- dan realisasi sebesar Rp. 122.937.582,- atau 59,46%

4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dengan kegiatan :
 - a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
 - b. Penyuluhan pencegahan dini penyakit masyarakat

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 437.325.000,- dan realisasi sebesar Rp. 374.508.782,- atau 85,64%.

5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan :
 - a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
 - b. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 628.882.000,- dan realisasi sebesar Rp. 597.340.770,- atau 94,98%.

Tujuan3.2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Profesional

Untukmencapaitujuantersebutdiatas,hasilayangakandicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut:

SASARAN STRATEGIS 3.2.1
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih,
Transparan dan Akuntabel

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:

Tabel.3.3.22
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2.1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100%
2.	Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 2	100%
3.	Persentase UKPP yang memiliki Hasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan public	26%	26,8%	103,08%
4.	Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	CC	92,05%
5.	Penerapan e-government yang terintegrasi	Na	Na	Na
Rata-rata Capaian				98,78%

Dari tabel 3.3.22 dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.2.1 sebesar 98,78%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalannya yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori **sangat baik**.

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari tabel 3.3.22 dapat dilihat, indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan target WTP terealisasi WTP dengan tingkat capaian sebesar 100%, termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Tanah Datar Tahun 2015 yang disampaikan dengan surat Nomor: 22.A/LHP/XVIII.PDG/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Realisasi dan capaian indikator kinerja opini BPK tahun 2015-2016 tercantum pada tabel 3.3.24

Tabel 3.3.23
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%

Dari tabel 3.3.23 dapat dilihat, capaian indikator kinerja opini BPK dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan *trend* pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Dilihat dari realisasi kinerja menunjukkan opini WTP dari BPK dapat dipertahankan yaitu, tahun 2015-2016 realisasi WTP sesuai target.

Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 yang diterima tahun 2016 adalah (WTP). WTP merupakan target terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sebesar 100% dengan realisasi adalah WTP atau dengan capaian 100%.

Pencapaian WTP ini tetap juga diperoleh pada tahun 2015 dan 2016 dari target yang ditetapkan atau tercapai sebesar 100%. Opini WTP pada tahun 2016 diterima oleh Bupati Tanah Datar dan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 24 Mei 2016 yang didampingi oleh Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Inspektur Kabupaten Tanah Datar.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk pencapaian target kinerja Opini BPK dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya komitmen Bupati Tanah Datar untuk melaksanakan Manajemen Pemerintah Daerah secara akuntabel

- b. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2015 dengan yang menyangkut:
 - 1) Rekomendasi tentang administrasi, keuangan, kepegawaian.
 - 2) Rekomendasi tentang permasalahan aset daerah.
- c. Inspektorat melaksanakan reviu atas laporan keuangan Kabupaten Tanah Datar yang disusun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016.
- d. Melaksanakan pemeriksaan secara reguler terhadap pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintahan Desa/Nagari secara berkelanjutan.
- e. Mengimplementasikan teknologi informasi dalam sistem manajemen keuangan daerah (Simda) Kabupaten Tanah Datar.
- f. Melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan validitas dan keakuratan data/angka yang terdapat dalam Laporan Keuangan.
- g. Memfasilitasi SKPD Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan laporan keuangan setiap tahun.

Dengan keberhasilan meraih opini BPK tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar telah efektif, efisien dan akuntabel. Program pendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan
 - a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - b. Penyusunan Prognosis realisasi anggaranDengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 170.360.000,- dan realisasi sebesar Rp. 148.321.706,- atau 87,06%.
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan:
 - b. Penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - c. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
 - d. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 - e. Bimtek implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah

f. Peningkatan manajemen aset daerah

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 1.106.406.000,- dan realisasi sebesar Rp. 990.486.467,- atau 89,52%.

2. Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dari tabel 3.3.22 dapat dilihat, indikator kinerja tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2016 target Level II dapat direalisasikan Level II dengan tingkat capaian sebesar 100 %, dengan kategori penilaian keberhasilan sangat baik.

Realisasi dan capaian indikator kinerja tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Barat, tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.26.

Tabel 3.3.24
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level I	Level II	100 %	100 %

Dari tabel 3.3.24 di atas dapat dilihat, capaian indikator tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan trend konsisten dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 100 % dengan kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini karena Kabupaten Tanah Datar telah mempunyai Tim Satgas SPIP yang salah satu tugasnya adalah memantau pelaksanaan pengendalian internal pada SKPD.

Untuk mendukung indikator ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan level SPIP dari level 1 ke level 2. Hal

ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah melalui pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah yang dilakukan Inspektorat agar tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Program pendukung indikator kinerja ini adalah :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - c. Inventarisasi temuan pengawasan
 - d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp.1.002.095.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 935.072.800,- atau 93,31%.

2. Program reformasi birokrasi pemerintahan daerah dengan kegiatan pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 31.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 30.653.200,- atau 98,88%.

3. Persentase Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang memiliki Hasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik

Dari tabel 3.3.22 dapat dilihat, indikator kinerja Persentase UKPP yang memiliki Hasil Survey Kepuasan Masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2016 target 26% dapat terealisasi 26,8% dengan tingkat capaian sebesar 103,08%, dengan kategori penilaian keberhasilan sangat baik.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase UKPP yang memiliki Hasil Survey Kepuasan Masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik, dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan bersama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Barat dari tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.25

Tabel 3.3.25
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Persentase UKPP yang memiliki Hasil Survey Kepuasan Masyarakat bernilai baik
atas penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Persentase UKPP yang memiliki Hasil Survey Kepuasan Masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik	22%	26,8%	100 %	103,08 %

Dari tabel 3.3.25 diatas, capaian indikator Persentase UKPP yang memiliki Hasil Survey Kepuasan Masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik menunjukkan trend peningkatan dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 103,08 % dengan kategori sangat baik.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Penerapan sistim informasi pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik telah dilaksanakan secara maksimal.
2. Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan publik.
3. Maklumat layanan yang dituangkan pada standar pelayanan telah dilaksanakan oleh unit kerja pelayanan.
4. Pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait dilakukan secara kontiniu.
5. Sarana dan prasarana fasilitas yang memadai.

Untuk mendukung indikator ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 571.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 463.282.113,- atau 81,11%.

4. Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Dari tabel 3.2.22 dapat dilihat, indikator kinerja peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2016 dengan target B (60), terealisasi CC (55,23), dengan capaian kinerja sebesar 92,05%, termasuk kategori penilaian keberhasilan sangat baik.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan bersama

dengan Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Barat dari tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.26

Tabel 3.3.26
Capaian Indikator Kinerja Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1.	Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	CC	CC	89,43	92,05%

Belum tercapainya indikator peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dikarenakan beberapa rekomendasi yang disarankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara utuh seperti reviu terhadap RPJMD dan RENSTRA masing-masing perangkat Daerah untuk memastikan dokumen tersebut sudah memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah.

Terhadap hasil capaian indikator ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk tahun-tahun selanjutnya akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain :

1. Menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki manajemen SAKIP.
2. Mereviu RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah guna memastikan dokumen tersebut memberikan arah yang jelas sesuai prioritas daerah dalam upaya pencapaian target jangka pendek jangka menengah yang lebih berorientasi outcome.
3. Melaksanakan penyempurnaan dokumen akuntabilitas kinerja pemerintah melalui pembentukan Tim Percepatan perbaikan manajemen SAKIP yang didampingi dan difasilitasi oleh Kementerian PAN RB.
4. Meningkatkan komitmen Kepala perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Datar dengan narasumber dari Kementerian PAN RB.

Untuk mencapai indikator kinerja ini, didukung oleh beberapa Program, yaitu:

1. Program pengembangan data/informasi dengan 13 kegiatan dengan total anggaran tahun 2016 sebesar Rp.885.258.380,- yang terealisasi sebesar Rp.834.871.085,- atau sebesar 94,31%
2. Program perencanaan pembangunan daerah dengan 9 kegiatan dengan total anggaran tahun 2016 sebesar Rp.1.702.311.000,- yang terealisasi sebesar Rp.1.508.712.480,- atau sebesar 88,63%
3. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.260.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp.201.251.966,- atau sebesar 77,4%
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah, dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala yang telah diungkapkan pada indikator Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dengan adanya penilaian peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2016 oleh Kementerian PAN dan RB menjadikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berusaha untuk memastikan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merujuk kepada sasaran RPJMD yang berorientasi outcome, sehingga hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

5. Penerapan e-government yang terintegrasi

Daritabel dapat dilihat, capaian indikator kinerja Penerapan e-government yang terintegrasi pada tahun 2016 belum dilaksanakan. Indikator ini dimunculkan untuk mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi serta untuk mewujudkan keinginan Kepala Daerah untuk menciptakan e-government yang terintegrasi di Kabupaten Tanah Datar sehingga memudahkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat .

Pada saat ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki 18 sistem aplikasi yang tersebar pada beberapa Perangkat Daerah, hanya saja saat ini sistem aplikasi tersebut belum terintegrasi satu sama lain. Terhadap hasil capaian indikator ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk tahun-tahun selanjutnya akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain :

1. Menyusun master plan Pengembangan e-goverment;
2. Rekrutment tenaga profesional dibidang teknologi informasi;
3. Peningkatan jaringan
4. Membangun data center

Dengan dilaksanakannya e-goverment diharapkan pemerintahan akan berjalan efisien, efektif dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Misi 4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan

Untuk mewujudkan misi 4 ini, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.27
Tujuan dan Sasaran Strategis Misi 4

Tujuan		Sasaran Strategis	
4.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	4.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
		4.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi

Tujuan 4.1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 4.1.1
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:

Tabel.3.3.28
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	55%	57,39%	104,35%
2.	Persentase ketersediaan Jembatan kondisi baik	54%	33,33%	61,72%
	Rata-rata Capaian			83,04%

Dari tabel 3.3.28 dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar 83,04%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian termasuk kategori **baik**. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 4.1.1 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik

Dari tabel 3.3.28 dapat dilihat, indikator kinerja persentase jalan dalam kondisi baik Tahun 2016 target 55% dapat terrealisasi sebesar 57,39% dengan tingkat capaian sebesar 104,35%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja persentase jalan dalam kondisi baik dihitung sebagai berikut:

persentase jalan dalam kondisi baik	$\frac{862.64 \text{ km jalan yang baik}}{1503.22 \text{ km jalan kabupaten}} \times 100\%$	=57,39%

Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2015-2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3.29
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Persentase jalan dalam kondisi baik Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	22%	57,39%	100 %	104,35%

Dari tabel 3.3.29 dapat dilihat, indikator kinerja Persentase Jalan dalam kondisi baik Tahun 2016 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,35%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian keberhasilan sangat baik, dibandingkan dengan Tahun 2015.

Adapun perkembangan kondisi panjang jalan di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2015 – 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.30
Perkembangan Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 – 2016

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2015	2016
1.	Jenis Permukaan:			
	a. Aspal	Km	848,81	835,42
	b. Kerikil/batu/beton	Km	157,59	265,60
	c. Tanah	Km	402,40	402,20
	Jumlah	Km	1.408,80	1.503,22
2.	Kondisi Jalan:			
	a. Baik (Mantap)/ sedang	Km	847,80	862,64
	a. Rusak/Rusak Berat (Tidak Mantap)	Km	561	640,58
	Jumlah	Km	1.408,80	1.503,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 3.3.30 jumlah jenis permukaan jalan aspal mengalami penurunan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 hal ini disebabkan karena adanya beberapa ruas jalan yang selama ini menjadi kewenangan kabupaten diserahkan menjadi kewenangan propinsi, sebanyak tiga ruas jalan sepanjang 21,4 km. Sedangkan jalan yang permukaan kerikil/batu/beton mengalami peningkatan dari 157,59 km pada tahun 2015 menjadi 265,60 km pada tahun 2016 disebabkan karena adanya penambahan jalan kabupaten yang sebelumnya adalah jalan desa/nagari.

2. Persentase Ketersediaan Jembatan Dalam Kondisi Baik

Dari tabel 3.3.28 dapat dilihat, indikator kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik tahun 2016 target 54% dapat terrealisasikan sebesar 57,39% dengan tingkat capaian sebesar 104,35%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik dihitung sebagai berikut:

persentase jembatan dalam kondisi baik	72 unit jembatan yang baik	X 100%	=33,33%
	216 jembatan yang ada		

Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik tahun 2015-2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3.31
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Persentase jembatan dalam kondisi baik Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Persentase jembatan dalam kondisi baik	N/A	33,33%	N/A	61,72%

Dari tabel 3.3.31 dapat dilihat, indikator kinerja Persentase Peningkatan Jembatan Berkualitas Baik Tahun 2016 target 54% dapat terrealisasikan sebesar 33,33% dengan tingkat capaian sebesar 61,72%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian keberhasilan cukup.

Upaya peningkatan kualitas jembatan ini dilakukan melalui rehabilitasi jembatan gantung menjadi jembatan rangka atau jembatan beton, pengecatan jembatan, dan pelebaran jembatan. Total jembatan sampai dengan tahun 2016 sebanyak 216 unit.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator Persentase jalan dalam kondisi baik dan Persentase jembatan dalam kondisi baik tahun 2016, yaitu :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan kegiatan
 - a. Perencanaan pembangunan jalan
 - b. Pembangunan jalan
 - c. Perencanaan pembangunan jembatan

d. Pembangunan jembatan

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 74.045.834.051,- dan realisasi sebesar Rp. 72.304.105.485,- atau 97,65%.

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan kegiatan

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 3.242.948.800,- dan realisasi sebesar Rp. 3.240.797.630,- atau 99,93%

3. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan dengan kegiatan :

- a. Penyusunan sistem informasi/data base jalan
- b. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 325.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 322.734.000,- atau 99,30%

SASARAN STRATEGIS 4.1.2
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi atas 1 (satu) indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:

Tabel.3.3.32
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Persentase irigasi berkondisi baik	60%	45,13%	75,22%

Dari tabel 3.3.32 dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi sebesar 75,22%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan,

keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi termasuk kategori **baik**.

1. Persentase Irigasi Berkondisi Baik

Dari tabel 3.3.32 dapat dilihat, indikator kinerja persentase irigasi berkondisi baik Tahun 2016 target 60% dapat terealisasi sebesar 45,13% dengan tingkat capaian sebesar 75,22%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian keberhasilan sangat **baik**.

Realisasi indikator kinerja persentase irigasi berkondisi baik dihitung sebagai berikut:

persentase irigasi berkondisi baik	13.198,2 hektar irigasi yang baik	X 100%	=45,13%
	29.241 hektar luas irigasi		

Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase irigasi berkondisi baik tahun 2015-2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3.33
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Persentase irigasi berkondisi baik Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Persentase irigasi berkondisi baik	30,06%	45,13%	72,57%	75,22%

Dari tabel 3.3.33 dapat dilihat, indikator kinerja Persentase irigasi berkondisi baik Tahun 2016 target 60% yang terealisasi 45,13% dengan tingkat capaian 75,22% dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan 2,65%.

Upaya peningkatan kualitas irigasi ini dilakukan melalui rehabilitasi atau perbaikan jaringan irigasi yang ada. Total irigasi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 635 unit irigasi dengan luasan 29.241 hektar.

Program yang dilaksanakan Tahun 2016 yaitu program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan:

1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
3. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
4. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
5. Pemberdayaan petani pemakai air

6. Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
7. Koordinasi Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)

Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 21.040.377.106,- dan realisasi sebesar Rp.18.974.091.651,- atau 90,81%

Misi5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah

Untuk mewujudkan misi 4 ini, ditetapkan 2 (dua) tujuandan4(empat) sasaranstrategisyang akan dicapaidaripelaksanaanprogramdankegiatanadalah sebagaiberikut:

Tabel3.3.34

Tujuan		Sasaran Strategis	
5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	5.1.1	PDRB Perkapita (dalam juta Rp)
		5.1.2	Penurunan Angka Kemiskinan
5.2	Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah dan nasional	5.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata (orang)

Tujuan 5.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapaitujuan tersebut diatas,hasil yang akan dicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut:

SASARAN STRATEGIS 5.1.1
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.35
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	PDRB Perkapita (dalam juta Rp)	30,82	32,77	106,33%
2.	Penurunan Angka Kemiskinan	5,23%	5,82%	89,86%
	Rata-rata Capaian			98,10%

Dari tabel 3.3.35 dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan sebesar 98,10%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian termasuk kategori **baik**. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 5.1.1 adalah sebagai berikut:

a. PDRB Perkapita (dalam juta Rp)

Dari tabel 3.3.35 dapat dilihat, capaian indikator kinerja PDRB Perkapita dengan target sebesar 30,82 terealisasi 32,77 dengan capaian kinerja 106,33% dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian termasuk kategori **sangat baik**. Realisasi indikator kinerja PDRB perkapita dilihat berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.

Realisasi dan capaian indikator kinerja PDRB perkapita tahun 2015-2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3.36
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
PDRB Perkapita (dalam juta Rp) Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	PDRB Perkapita (dalam juta Rp)	30,49	32,77	106,46 %	106,33%

Dari tabel 3.3.36 dapat dilihat, realisasi dan pencapaian indikator kinerja PDRB Perkapita (dalam juta Rp) tahun 2016 capaian kinerja sebesar 106,33% menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,13%.

Hal ini disebabkan karena terjadinya musim kemarau panjang di Kabupaten Tanah Datar yang menyebabkan sektor pertanian sebagai sektor penyumbang utama dalam PDRB mengalami penurunan hasil produksi, disamping itu juga karena kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan kenaikan harga-harga.

Namun dari realisasi PDRB Perkapita (dalam juta Rp) tahun 2016 sebesar 32,77 terjadi peningkatan sebesar 2,28 dari realisasi tahun 2015 sebesar 30,49, yang disebabkan peningkatan kontribusi beberapa sektor terhadap PDRB yaitu:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Informasi dan Komunikasi
5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
6. Jasa lainnya

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Datar adalah Meningkatkan produksi sektor-sektor unggulan melalui program kegiatan yang ada dan mengoptimalkan SDM aparatur.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini tahun 2016, yaitu :

1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan kegiatan
 - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
 - Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
 - Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Sektor Pertanian dan Perkebunan

Dengan total anggaran sebesar Rp 5.116.900.000 yang terealisasi sebesar Rp. 4.727.591.631 atau sebesar 92,39%

2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan kegiatan

- Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
- Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Dengan total anggaran sebesar Rp. 1.160.731.000 yang terealisasi sebesar Rp. 1.032.185.400 atau sebesar 88,93%

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

- Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
- pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Dengan total anggaran sebesar Rp. 537.742.845 yang terealisasi sebesar Rp. 458.346.924 atau sebesar 85,24%

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 2.189.016.500 yang terealisasi sebesar Rp. 1.735.484.750 atau sebesar 79,28%

5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dengan kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Rp. 690.200.000 yang terealisasi sebesar Rp. 599.608.700 atau sebesar 86,87%

6. Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan

- Pembibitan dan perawatan ternak
- Pengadaan sarana dan prasarana peternakan

Dengan total anggaran sebesar Rp. 1.149.781.000 yang terealisasi sebesar Rp. 1.030.862.240 atau sebesar 89,66%

7. Program pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan

- Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
- Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
- Promosi produksi industri kecil menengah

Dengan total anggaran sebesar Rp. 320.317.500,- yang terealisasi sebesar Rp.293.738.600 atau sebesar 91,70%

8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan

- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

Dengan total anggaran sebesar Rp. 95.335.000,- yang terealisasi sebesar Rp.87.793.500 atau sebesar 92,09%

9. Program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan kegiatan

- Pembinaan kemampuan teknologi industri
- Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) daerah

Dengan total anggaran sebesar Rp. 277.996.000,- yang terealisasi sebesar Rp.268.091.280 atau sebesar 96,44%.

10. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan

- Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
- Koordinasi Bidang mineral dan batubara

Dengan total anggaran sebesar Rp. 45.412.000,- yang terealisasi sebesar Rp.39.749.700,- atau sebesar 87,53%.

11. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan dengan kegiatan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat dengan anggaran Rp.7.805.000,- yang terealisasi Rp. 7.789.000,- atau sebesar 99,80%

12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan kegiatan

- Inventarisasi potensi sumber daya mineral
- Evaluasi kejadian bencana dan geologi
- Pemetaan zona kerentanan gerakan tanah

Dengan total anggaran sebesar Rp. 175.939.000,- yang terealisasi sebesar Rp.169.885.500,- atau sebesar 96,56%.

13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan:

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- Pembinaan dan pengelolaan media informasi
- Pengelolaan ICT Training Center

Dengan total anggaran sebesar Rp.202.500.000,- yang terealisasi sebesar Rp.177.503.900,- atau sebesar 87,66%.

14. Sektor jasa lainnya disumbangkan oleh program dan kegiatan yang mendukung pariwisata dan perhotelan.

b. Penurunan Angka Kemiskinan

Dari tabel 3.3.35 dapat dilihat, capaian) indikator kinerja penurunan angka kemiskinan dengan target sebesar 5,23%, terealisasi 5,82 dengan capaian kinerja 89,86% dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian termasuk kategori **sangat baik**. Realisasi indikator kinerja PDRB perkapita dilihat berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.

Realisasi dan capaian indikator kinerja penurunan angka kemiskinan tahun 2015-2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3.37
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Penurunan Angka Kemiskinan	5,82%	5,82%	90,89%	89,86%

Dari tabel 3.3.37 dapat dilihat, realisasi dan capaian indikator kinerja Penurunan Angka Kemiskinan tahun 2016 capaian kinerja sebesar 89,86% menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,03% yang disebabkan karena dasar penghitungan angka kemiskinan merupakan

data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan dalam 2 (dua) tahun sekali sehingga menyebabkan realisasi capaian kinerja turun dibanding tahun sebelumnya, untuk angka kemiskinan tahun 2016 akan di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2017. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah dengan angka kemiskinan terendah dibanding daerah-daerah lain di Provinsi Sumatera Barat.

Upaya- upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menurunkan angka kemiskinan adalah:

1. Membuka Lapangan pekerjaan baru pada beberapa sektor unggulan seperti pariwisata.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan padat karya yang dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Memberikan bantuan tunai untuk pengembangan usaha mikro melalui perangkat daerah terkait serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar.
4. Memberikan bantuan sosial untuk masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pariwisata nagari setiap tahunnya sebagai ujung tombak Kabupaten Tanah Datar

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini tahun 2016, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan:
 - Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
 - Penyusunan database penyandang masalah kesejahteraan sosialDengan total anggaran sebesar Rp. 153.343.950,- yang terealisasi sebesar Rp.150.043.908,- atau sebesar 97,85%.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
 - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- Administrasi pengelolaan bantuan sosial
- Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran

Dengan total anggaran sebesar Rp.501.869.500,- yang terealisasi sebesar Rp.414.437.904,- atau sebesar 82,58%.

3. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif, dengan kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah, dengan anggaran sebesar Rp. 82.325.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 61.012.000,- atau sebesar 74,11%
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, dengan anggaran Rp.49.145.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 47.940.500,- atau sebesar 97,55%
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan :
 - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
 - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
 - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
 - Peningkatan kemampuan lembaga petani
 - Penyediaan prasarana dan sarana budidaya dan pasca panen tembakau
 - Penilaian petugas dan petani berprestasi

Dengan total anggaran sebesar Rp.1.222.688.575,- yang terealisasi sebesar Rp.1.040.872.362,- atau sebesar 85,13%.

6. Program pengembangan perikanan tangkap, dengan kegiatan :
 - Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
 - Pembinaan Nelayan pengolah dan pemasaran ikan

Dengan total anggaran sebesar Rp.97.104.000,- yang terealisasi sebesar Rp.76.501.800,- atau sebesar 78,78%

Tujuan 5.2 Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah dan nasional

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 5.2.1
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata adalah jumlah wisatawan ke objek wisata (orang) Realisasi dan pencapaian indikator tersebut cantumkan pada tabel 3.3.38

Realisasi indikator jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata dihitung sebagai berikut:

kunjungan wisatawan ke objek wisata	1.189.439 orang wisatawan tahun ini	=1.189.439 orang
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------

dari jumlah kunjungan wisatawan tahun ini dikurangi dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu

Tabel 3.3.38
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata (orang)	1.000.000 orang	1.189.439 orang	118,9%

Dari tabel 3.3.38 dapat dilihat, capaian indikator kinerja jumlah wisatawan ke objek wisata (orang) adalah sebesar 118,9%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.3.1 termasuk kategori **sangat baik**.

Realisasi indikator jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata dihitung dari jumlah kunjungan wisatawan tahun ini dikurangi dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah wisatawan ke objek wisata (orang) telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan :

- a. Pengembangan objek pariwisata unggulan.
 - b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 2.507.670.000,- terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 2.375.334.000,- . dan terealisasi sebesar 1.394.512.100 atau 59%. Rendahnya realisasi program ini karena tidak terealisasinya pembangunan kios di Istano Basa Pagaruyung disebabkan tidak terealisasinya pengadaan tanah pada kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
2. Program Pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi dengan sektor pariwisata.
 - b. Promosi pariwisata dalam dan luar negeri.
 - c. Menyelenggarakan event/lomba bidang kepariwisataan.
Dengan jumlah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 789.273.000,- dan realisasi sebesar Rp. 736.617.248,- atau 93,33%.
3. Program Pengembangan kemitraan dengan kegiatan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 34.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 32.024.375,- atau 92,82%.
4. Program/kegiatan SKPD lain terkait dengan pencapaian indikator kinerja kunjungan wisata ke objek wisata
- Perbaikan jalan dari kota Batusangkar menuju Istano Basa Pagaruyung
 - Perbaikan jalan dari kota Batusangkar menuju pemandian aie angek padang ganting
 - Pelebaran jalan sungayang menuju objek wisata puncak pato
 - Pengadaan kontainer di lapangan cindua mato dan bumi perkemahan
 - Pembangunan trotoar kubu rajo/limakaum

3.4. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 untuk menunjang 11 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 dan penyesuaiannya adalah sebesar Rp.179.364.604.485,- terealisasi sebesar Rp.164.960.278.772,- atau 91,96%. Artinya terdapat sisa anggaran sebesar 8,04% atau secara absolut sebesar Rp 14.404.325.713,-. Sisa Anggaran sebesar Rp 14.404.325.713,- mencerminkan belum akuratnya perencanaan dan penganggaran

program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.5. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 11 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1
Anggaran Dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Yang Menunjang
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengamalan ajaran agama Islam	4.207.488.000,-	4.166.584.956,-	96,49%
2	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	730.925.000,-	714.512.850,-	97,75%
3.	Meningkatnya mutu Pendidikan	16.227.348.595,-	14.370.799.041,-	90,79%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	34.256.597.933,-	29.154.541.554,-	84,21%
5.	Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana	272.140.750,-	266.140.850,-	97,86%
6.	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum	2.012.055.000,-	1.750.725.616,-	82,76%
7.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	5.728.630.380,-	5.112.651.817,-	88,77%
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	77.613.782.851,-	75.867.637.115,-	98,75%
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	21.040.377.106,-	18.974.091.651,-	90,81%
10.	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	14.076.151.870,-	12.419.439.599,-	88,95%
11.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3.199.107.000,-	2.163.153.723	81,71%
	JUMLAH	179.364.604.485,-	164.960.278.772,-	91,96%

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dari tabel 3.4.1 dapat dilihat Jumlah belanja langsung APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 sebesar Rp. 470.062.558.000,-. Untuk menunjang 11 sasaran strategis di alokasikan dana sebesar Rp.179.364.604.485,- atau 38.15%

BABIV PENUTUP

Pemerintahan Daerah sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, adalah penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Untuk terlaksananya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah otonom untuk periode 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. RPJM ini merupakan pedoman yang menentukan arah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021. Dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanah Datar dimaksud, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2016.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016, untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menetapkan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Tanah

Datarj u g a telahmelakukanpengukurankinerjauntukpelaksanaankerjatahun2016, yang telahdisusundalambentukLaporanKinerjaPemerintahKabupaten Tanah DatarTahun2016, dengankesimpulansebagiaiberikut:

1. LaporanKinerjaPemerintahKabupaten Tanah DatarTahun2016mencakup13(tigabelas)sasaranstrategisyangdiukurdengan23(duapuluhtiga) indikatorkinerja.
2. Rata-ratacapaian22(duapuluhdua)indikatorkinerjasebesar108,54%.ArtinyasecaraumumcapaianindikatorkinerjaPemerintahKabupaten Tanah DatarTahun2016 termasukberhasildengankategori**sangatbaik**.
3. Kategoripenilaiankeberhasilancapaian22(duapuluhdua) indikatorkinerjaadalahsebagiaiberikut:
 - a. Capaianindikatorkinerjayangberhasildengankategori**sangatbaik**(sebesar ≥ 85 %) sebanyak18(sembilan belas)indikatorkinerja.
 - b. Capaianindikatorkinerjayang berhasildengankategori**baik**($\geq 69-84$ %)sebanyak1 (satu) indikatorkinerja.
 - c. Capaianindikatorkinerjayang berhasildengankategori**Cukup**(53-68%)sebanyak2(dua) indikatorkinerja.
 - d. Satuindikatorkinerjabelum dapatdiukur karena baru akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

Anggaranprogramyangmenunjangpencapaian13(tigabelas)sasaranstrategisdan23(duapuluhtiga) indikatorkinerjaadalahsebesarRp.179.364.604.485,- direalisasikan sebesarRp.164.960.278.722,-atau91,96%.Artinya,dalampelaksanaan program/kegiatan tahun2016 terdapat sisa anggaran yang cukupsignifikansebesar8,04%atausecaraabsolutsebesarRp.14.404.325.763,-.Halini mencerminkan masih kurang akuratnya alokasi anggaran pada masing-masing program/kegiatan yang mengakibatkan besarnya dan yang tidak termanfaatkan secara baik untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang

dicapai dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,
dan masyarakat oleh Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2016. Dimas mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar akan melakukan langkah-langkah perbaikan yang
terus menerus (*continuous improvement*) melalui penguatan manajemen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tanah
Datar, dengan menciptakan keselarasan dan integrasi sistem perencanaan pembangunan dan
sistem penganggaran yang berbasis kinerja,
guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2021

VISI :TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja						Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya	1 Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya	1 Meningkatnya pengamalan ajaran agama Islam	1 Jumlah hafidz Alquran	325	1000	1250	1500	1750	2000	2250	Jumlah Hafidz Alquran	Bagian Kesra , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2 Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun pada BAZ Kab.Tanah Datar	Rp 8.895.355.470	5%	10%	12%	15%	18%	20%	Jumlah Zakat yang terhimpun pada BAZ Tanah Datar Tahun ini - Jumlah Zakat yang terhimpun pada BAZ Tanah Datar pada Tahun Lalu X 100%	Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, BAZ Tanah Datar
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	2 Meningkatnya pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Persentase Nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat	0%	5%	20%	35%	50%	65%	80%	Jumlah Nagari berkategori BAIK dalam penerapan tradisi adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat X 100%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan Dinas PMDPPKB
				1 Angka Partisipasi Murni (APM)	90,67%	90,89%	91,11%	91,33%	91,55%	91,77%	91,99%	Jumlah Nagari di Kabupaten Tanah Datar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				- SD/MI	81,69%	81,73%	81,77%	81,81%	81,85%	81,89%	81,93%	Jumlah Siswa SD/MI usia 7-12 Th X 100%	
				- SMP/MTs	81,69%	81,73%	81,77%	81,81%	81,85%	81,89%	81,93%	Jumlah Siswa SMP/MTs usia 13-15 Th X 100%	
				2 Angka rata - rata lama sekolah	7,93	8,03	8,13	8,18	8,28	8,33	8,38	Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja						Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
				3 Persentase penduduk Melek Huruf usia diatas 15 tahun	98,70%	98,76%	98,82%	98,88%	99%	99%	99,06%	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis X 100% Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	326	321	316	311	306	301	301	Jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas (waktu tertentu) X 100.000 Jumlah Kelahiran hidup pada waktu yang sama	Dinas Kesehatan dan RSUD
				2 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	15,2	14,44	13,77	13,03	12,38	11,76	11,17	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal pada kurun (waktu tertentu) X 1.000 Jumlah Kelahiran hidup pada waktu yang sama	
				3 Persentase kepersertaan Masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	56,20%	66,8%	76,2%	85,6%	95%	100%	100%	Jumlah Penduduk yang telah terdaftar pada SJSN Bidang Kesehatan X 100% Jumlah Penduduk	
			3 Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,7	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	Jumlah Anak Jumlah Keluarga	Dinas PMDPPKB
3	Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	1 Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum	Rasio Angka kriminalitas	10.06	10.05	10.04	10.03	10.02	10.01	10	Angka Kriminalitas x 10.000 Jumlah Penduduk	Satpol PP Damkar, Kesbangpol, Bagian Hukum Setda
		2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	1 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Datar	Inspektorat, BKD

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja						Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
				2 Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan SPIP oleh BPKP	Inspektorat
				3 Persentase UKPP yang memiliki Hasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik	22%	26%	35%	50%	65%	75%	80%	$\frac{\text{Jumlah UKPP yang memiliki hasil SKM bernilai baik}}{\text{Jumlah seluruh UKPP}} \times 100\%$	Bagian Organisasi Setda
				4 Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	CC	B	BB	BB	BB	A	A	Peringkat Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Tanah Datar oleh Kementerian PAN dan RB	Baperlitbang, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda
				5 Penerapan e-government yang terintegrasi	N/A	N/A	5	10	14	16	18	Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi di Kabupaten Tanah Datar	Dinas Kominfo
4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	1 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	1 Persentase jalan dalam kondisi baik	49,51%	55%	60%	65%	68%	75%	80%	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kabupaten tanah datar}} \times 100\%$	Dinas PU
				2 Persentase ketersediaan Jembatan kondisi baik	49,51%	54%	57%	60%	63%	67%	72%	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan di Kabupaten Tanah Datar}} \times 100\%$	Dinas PU
			2 Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase irigasi berkondisi baik	41,42%	60%	65%	70%	85%	90%	100%	$\frac{\text{Jumlah irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah irigasi}} \times 100\%$	Dinas PU, Dinas Pertanian
5	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah	1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan	1 PDRB Perkapita (dalam juta Rp)	28,64	30,82	32,99	35,17	37,34	39,52	41,69	Sumber data BPS	Baperlitbang, Dinas Koperindag, Dinas PMPTSP Naker, Bagian Perekonomian Setda
				2 Penurunan Angka Kemiskinan	5,29%	5,23%	5,18%	5,12%	5,06%	5,00%	5,00%	Sumber data BPS	Baperlitbang, Dinas Sosial PPPA

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja						Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		2 Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah dan nasional	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata (orang)	984.929	1.000.000	1.025.000	1.060.000	1.090.000	1.120.000	1.150.000	Jumlah kunjungan wisatawan Tahun ini - Jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu	Dinas Parpora, Dinas PU, Dinas Koperindag, Satuan Pol PP Damkar